

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang

Kretisana Jagi

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
mey.jn15@gmail.com

ABSTRACT

The Community Empowerment Institute (LPM) is an organization that aims to strengthen the role of society in development, one of which is economic development. LPM functions as a forum for mobilizing and developing the potential and abilities of the community in developing the potential that exists in their area. Some of LPM's roles in economic development include community empowerment. LPM plays a role in empowering communities to understand, access and utilize various available resources. The temporary survey shows that the role of LPM in improving the community economy in Penkase Oeleta Subdistrict through activities in the economic sector has not been maximized. LPM as an institution formed by the government with the aim of improving community welfare is expected to be able to create training and community development activities, so that the community's economy can be further improved. The aim of the research is: to determine the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in improving the community economy in Penkase Village. The research will take place from January-June 2023. The type of data is primary data, secondary data. Results obtained: LPM plays a strategic role in identifying local economic potential and designing programs aimed at improving community welfare. LPM has succeeded in increasing people's skills and knowledge in the fields of entrepreneurship, financial management and agricultural technology. LPM also plays a role in ensuring sustainable management of natural resources that benefits local communities

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan salah satunya pembangunan ekonomi. LPM berfungsi sebagai wadah untuk memobilisasi dan membina potensi serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka. Beberapa peran LPM dalam Pembangunan secara ekonomi antara lain adalah Pemberdayaan masyarakat. LPM berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Survey sementara menunjukan bahwa, peran LPM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta melalui kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian belum maksimal, LPM sebagai Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase. Penelitian yang berlangsung dari bulan Januari-Juni 2023. Jenis data yang adalah data primer data sekunder. Hasil yang diperoleh : LPM memainkan peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LPM berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi pertanian. LPM juga berperan dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Kata kunci: *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi Masyarakat dilakukan untuk mendorong, memotivasi dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Dengan begitu, maka kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan tujuan agar masyarakat mampu dan dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat dengan

upaya meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat dalam kondisi yang tidak mampu agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan ketebelakangan (Soetomo, 2013:294).

Upaya pemberdayaan ini tidak bisa berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat dan tentunya masyarakat itu sendiri. Dalam proses mewujudkan harapan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam Pembangunan salah satunya Pembangunan ekonomi. Peran LPM dalam pengembangan ekonomi di kelurahan sangat penting karena LPM berfungsi sebagai wadah untuk memobilisasi dan membina potensi serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka. LPM juga dapat berperan sebagai fasilitator antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan (Mardikanto, 2014:105).

Beberapa peran LPM dalam Pembangunan secara ekonomi antara lain adalah Pemberdayaan masyarakat. LPM berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan oleh LPM. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. LPM juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa/kelurahan dengan membangun usaha kecil dan menengah kemudian penguatan kemandirian desa/kelurahan dengan memberikan dukungan dan bimbingan untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bambang Trisantono Soemantri, 2011:75).

Survey sementara menunjukan bahwa, peran LPM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta melalui kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian belum maksimal, LPM sebagai Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Masalah : bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “empowerment”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-sehari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, Pendidikan, dan Kesehatan (Hamid, 2018). Menurut etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kapasitas. Menurut Edi Suharto bahwa konsep pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata “power” kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru Pembangunan, yang bersifat people centered (berpusat pada manusia), Participatory (partisipatif), empowering (memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan) (Alfitri, 2011).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih Sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

Konsep Pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga

belum mengangkat Sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meingkatkan keberpihakan Pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai model Pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah :

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Lembaga ekonomi, Lembaga politik, Lembaga hukum, Lembaga keagamaan, Lembaga adat dan Lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.
2. Dalam UU Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegaskan “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan Prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran masyarakat”.
3. Mencermati kedua rumusan kebijakan pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”.
4. Dalam UU Nomor 25 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan Lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan swadaya masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik.
5. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, badan pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandiria masyarakat.
 - b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga. Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya (Zulkarnain).

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan system ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau memberdayakan. Upaya penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama Pasal 33 adalah :

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa memujudkan keadilan dalam masyarakat. system ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat besar.

Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan.

Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu diorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat di kelurahan sebagai pusat pembangunan (Aritonang, dalam Rahmat, 2015).

Berikut ini merupakan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (Amin Jaya, 2023)

:

1. **Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelurahan**
Pemberdayaan masyarakat di bidang kelurahan mencakup semua sumber daya yang ada di kelurahan. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program kelurahan, koordinasi dalam pelaksanaan program-program kelurahan, dan peningkatan kualitas kinerja di kelurahan. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja kelurahan dalam membangun serta memajukan.
2. **Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelembagaan**
Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu kelurahan dalam menjalankan roda pembangunan.
1. **Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi**
Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Kelurahan. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industry rumah tangga, pasar, penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodal/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
2. **Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Teknologi**
Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah dalam mengikuti zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.
3. **Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan**
Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
4. **Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan**
Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

3. METODOLOGI

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang. Waktu penelitian yang berlangsung selama 6 bulan dari bulan Januari-Juni 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Ada dua jenis data dalam penelitian yang digunakan yaitu : Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber -sumber primer yakni secara langsung dari sumber data ke pengumpulan data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua LPM, Aparat Kelurahan dan Masyarakat penerima bantuan dana PEM. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder merupakan data penelitian yang berupa data-data yang telah tersedia yang dapat diperleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui arsip, buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, situs internet, dan referensi tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa: Observasi, wawancara dan dokumentasi. adalah mengumpulkan data mengenai hal-hal yang akan diteliti juga berhubungan dengan objek penelitian, data-data pendukung penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta beberapa data yang diperlukan selama proses penelitian seperti Data Gografis Kelurahan, demografi penduduk dan lain-lain

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Fungsi dari LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Berikut adalah beberapa peran LPM dalam konteks tersebut:

1. **Pemberdayaan Ekonomi**
LPM berperan dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan mengembangkan program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pemberian bantuan modal
2. **Fasilitasi Akses Perdagangan**
LPM membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan membuka jaringan dengan pasar lokal maupun regional, LPM dapat membantu petani, nelayan, dan pengrajin untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik.
3. **Pelatihan dan Pendidikan**
LPM menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi. Ini termasuk pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi pertanian yang lebih modern.
4. **Pengembangan Infrastruktur**
LPM berperan dalam advokasi dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, memperbaiki jalan akses ke lahan pertanian atau pasar, serta menyediakan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian.
5. **Kerjasama dengan Pihak Eksternal**
LPM sering bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendapatkan bantuan dan sumber daya yang diperlukan dalam program pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi ini dapat berupa bantuan teknis, dana hibah, atau investasi.
6. **Mendorong Partisipasi Masyarakat**
LPM mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap program yang dijalankan. Partisipasi aktif ini penting agar masyarakat merasa memiliki program tersebut dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutannya
7. **Pengelolaan Sumber Daya Alam**
Di wilayah seperti Penkase Oeleta yang mungkin memiliki sumber daya alam yang potensial, LPM berperan dalam memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat setempat. Misalnya, mengelola kawasan hutan atau pesisir secara Lestari.
8. **Monitoring dan Evaluasi**
LPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Dengan melakukan evaluasi berkala, LPM dapat menyesuaikan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Deskripsi Peran dari LPM

Hasil analisis mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Peran Strategis LPM:** LPM memainkan peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, LPM mampu mengarahkan sumber daya dan upaya ke bidang-bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
2. **Peningkatan Kapasitas Masyarakat:** Melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, LPM berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi pertanian. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
3. **Fasilitasi Akses Pasar dan Kerjasama:** LPM juga berperan penting dalam membuka akses pasar bagi produk-produk lokal serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Kerjasama ini memberikan dukungan yang signifikan dalam bentuk bantuan teknis, modal, dan akses jaringan yang lebih luas.

4. Pengembangan Infrastruktur: Advokasi yang dilakukan oleh LPM dalam pengembangan infrastruktur mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, fasilitas penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian mempercepat distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
5. Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh LPM menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program-program yang ada.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam: LPM juga berperan dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Pengelolaan yang baik mencegah eksploitasi berlebihan dan menjaga kelestarian lingkungan yang pada gilirannya mendukung kegiatan ekonomi jangka panjang.

Secara keseluruhan, peran LPM di Kelurahan Penkase Oeleta terbukti efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, LPM mampu mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan yang ada dapat diatasi melalui kerjasama yang baik antara LPM, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, sehingga tercapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga kelurahan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa: LPM memainkan peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LPM berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi pertanian. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. LPM juga berperan penting dalam membuka akses pasar bagi produk-produk lokal serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Advokasi yang dilakukan oleh LPM dalam pengembangan infrastruktur mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh LPM menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. LPM juga berperan dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

5.2. Saran

- 1) LPM Memberikan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi.
- 2) LPM : Memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 3) LPM melakukan monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai keberhasilan program dan melakukan perbaikan yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 *tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat (LPM)* .
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 *tentang Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LPM)* Hasan, Muhamad dan Aziz, 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal* . Sulawesi Tengah : CV. Nur Lina .
Muhamad Alhada Faudilah Habib, 2021 . *Ar Rahle : Journal of Islamic Tourism, Halal food, Islamic Traveling, and Creative Economy* . *Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif* .
Munawar Noor 2011, *Jurnal Ilmiah CIVIS* . *Pemberdayaan Masyarakat* .
Amar, Syamsul. 2002 “Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan di Pedesaan Propinsi Sumatra Barat” , *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 7, Nomor 2* (103-111)
Mubayarto , 2002 “Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dalam Era Otonomi Daerah “*Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun I, No.9
Tim Penanggulangan Masalah Kemiskinan (TPMK), 2005, *Buku Kemiskinan di Indonesia*, Penerbit Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
Todaro, Michael. P, 1997, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Edisi Terjemahan, Cetakan Pertama, Penerbit Earlangga, Jakarta .
Saleh, Samsubar, 2002, “Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia” , *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 7 No.2* (87-102).

- Suryawati, Chriswardani, 2004, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No 03, Edisi September (121-129).
- Ismail Nanawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009)
- Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997)
- Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2023)
- Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri Perss, 2002)
- Mubyarto *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997)
- Amin Jaya "Porogram Pemberdayaa Masyarakat dan Program-program .
- Andi Aris "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media" JUPITER Vol. XIII No.2 (2014) .
- Yunnir Melany Kiu "Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang" Volume 4 No 2, Desember 2018 .
- Keputusan Walikota Kupang No. 1/Kep/HK/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kupang No. 15A/Kep/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang.
- Peraturan Menteri Keuangan 218/PMK. 05/2009 pasal 1 ayat 1 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah